

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
SURVEY ZONA INTEGRITAS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN III (PERIODE JULI 2024 – SEPTEMBER 2024)



DISUSUN OLEH :
TIM SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, akhirnya Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyelesaikan hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan I dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada masyarakat, oleh karena itu kami mengadakan survei ini secara berkala sebagai bagian dari rencana dan sasaran mutu dalam pemeliharaan kualitas layanan yang telah dicapai. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pengguna dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini bertujuan meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang diambil dengan menggunakan aplikasi e-Survey yang dikembangkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan - perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas dan masyarakat pengguna layanan kami.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Oktober 2024

Tim Survei

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
SURVEY ZONA INTEGRITAS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN III TAHUN 2024
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Yogyakarta
Pada Hari Rabu, 4 Oktober 2024

Ketua



Tri Asnuri Herkunto, S.H.,MH

Sekretaris Utama



Meilyna Dwijanti, S.H.,MH

Contents

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI TABEL.....	3
DAFTAR ISI GRAFIK.....	4
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	5
B. Tujuan	5
C. Sasaran.....	5
D. Landasan Hukum.....	6
E. Definisi	6
BAB II.....	7
METODOLOGI.....	7
A. Metode Penelitian	7
B. Populasi Dan Sampel.....	8
C. Pelaksanaan Dan Teknik Survei	8
D. Prosedur Survei.....	9
E. Tim Survei IPAK	9
F. Prosedur Survei.....	10
BAB III	10
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	10
A. PROFIL RESPONDEN	11
1. Jenis Kelamin Responden.....	11
2. Tingkat Pendidikan Responden.....	11
3. Pekerjaan Responden	12
4. Umur Responden	12
5. Domisili Responen.....	13
B. PERSEPSI ANTI KORUPSI PER INDIKATOR.....	14
1. Diskriminasi Pelayanan	14
2. Pelayanan Diluar Prosedur.....	15
3. Penerimaan Imbalan/Suap	16
4. Pungutan Liar	17
5. Praktik Percaloan	18
BAB IV	20
PENUTUP	20

A. Kesimpulan.....	20
B. Rekomendasi.....	20
LAMPIRAN.....	22

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden.....	11
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden	11
Tabel 3. Pekerjaan Responden.....	12
Tabel 4. Umur Responden	13
Tabel 5. Domisili Responden.....	13
Tabel 6. Diskriminasi Pelayanan	14
Tabel 7. Pelayanan Diluar Prosedur.....	15
Tabel 8. Penerimaan Imbalan/Suap	16
Tabel 9. Pungutan Liar.....	17
Tabel 10. Praktik Percaloan	18
Tabel 11. Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta	19
Tabel 12. Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	19

DAFTAR ISI GRAFIK

Grafik 1. Jenis Kelamin Responden.....	11
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden.....	12
Grafik 3. Pekerjaan Responden.....	12
Grafik 4. Umur Responden.....	13
Grafik 5. Domisili Responden.....	14
Grafik 6. Diskriminasi Pelayanan.....	15
Grafik 7. Pelayanan Diluar Prosedur.....	16
Grafik 8. Penerimaan Imbalan/Suap.....	17
Grafik 9. Pungutan Liar.....	18
<i>Grafik 10. Praktik Percaloan.....</i>	19
Grafik 11. Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Survey Zona Integritas (ZI) Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Triwulan III Tahun 2024 (periode Juli 2024 – September 2024) ini sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.

2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

E. Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

9 (Sembilan) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. Ilegal profit;

4. Secret transaction;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme

BAB II METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing - masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing - masing unit pelayanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \left\{ \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} \right\}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 140 orang, maka merujuk pada **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** maka responden tersebut sudah dapat dilakukan perhitungan.

C. Pelaksanaan Dan Teknik Survei

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarluaskan elektronik kuesioner (e-survey) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu masyarakat selaku pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive* sampling atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian masyarakat yang menerima pelayanan selama periode triwulan III Tahun 2024. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei **IPAK**.

- b. Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
 - c. Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survey
2. Proses Survei
- a. Pelaksanaan e-survey dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) yang telah disematkan pada website Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA maupun komputer khusus yang ada di PTSP.
 - b. Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui e-survey dilakukan dengan mengakses link berikut: http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_dashboard Melakukan pengecekan secara berkala sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan e-survey.

D. Prosedur Survei

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk *skoring/angka* absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 — 4. Skala indeks persepsi korupsi Antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI

E. Tim Survei IPAK

Tim Survei IPAK Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA terdiri dari :

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1.	Tri Asnuri Herkutanto,S.H.,MH	Hakim	Ketua Tim
2.	Meulyna Dwijanti,S.H.,MH	Panitera	Sekretaris Utama
3.	Andang Catur Prasetya,S.H.,MH	Panmud Hukum	Sekretaris I
4.	Nindya Yosdalu Putra	Staf Kepan Hukum	Sekretaris II

5.	Yenny Vikky Effendy,ST.,S.H., M.Eng	Kasub PTIP	Anggota
6.	Jeane Pamela,S.Kom.,MT	Staf Perdata	Anggota
7.	Nurmaya Rezeky AR,S.H	Juru Sita	
8.	Salasa Agus Ekoyadi,S.H	Juru Sita	Anggota
9.	Nugraha Abdilah,S.Kom	Staf PTIP	
10.	Okta Emilia Larsati,S.H	Staf Tipikor	
11.	Nadya Maulani Melyana,A.md	Staf PHI	

F. Prosedur Survei

Responden dapat mengisi e-survey persepsi korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab e-survey, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, Nomor Telpon dan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat I P A K Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-survey. Adapun indikator – indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Diskriminasi Pelayanan
2. Pelayana diluar prosedur
3. Penerimaan imbalan/suap
4. Pungutan liar
5. Praktik percaloan

BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

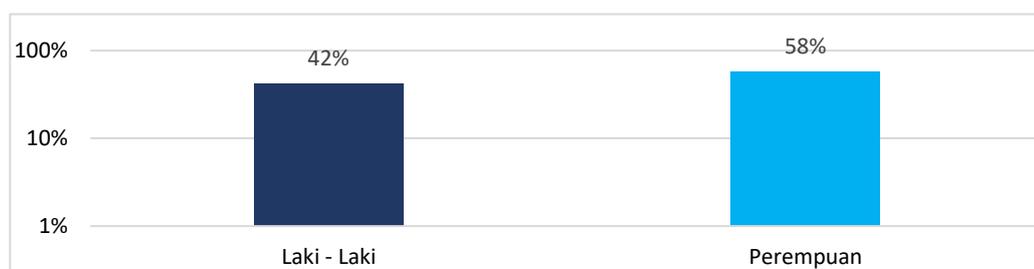
A. PROFIL RESPONDEN

1. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 140 reponden, dimana pengguna layanan yang berjenis kelamin Laki – Laki sebanyak 59 orang atau 42,14% dan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 81 orang atau 57,85%.

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Laki - Laki	59	42,14
2	Perempuan	81	57,85
Jumlah		140	100

Jika ditampilkan dalam *Tabel 1. Jenis Kelamin Responden* grafik akan tampak seperti dibawah ini :



Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

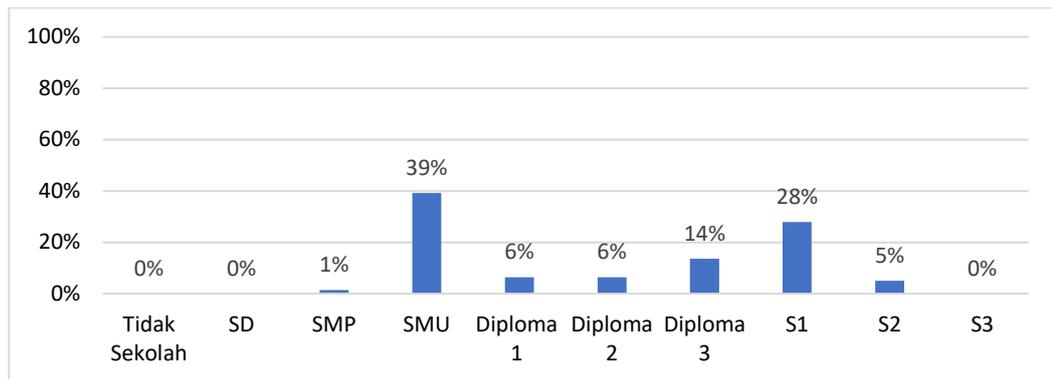
2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 140 reponden, dimana pengguna layanan yang paling banyak mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) sebanyak 55 orang atau 39,20%.

NO	JENIS PENDIDIKAN	FREKUENSI	
		JUMLAH	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	2	1,42
4	SMU	55	39,20
5	Diploma 1	9	6,42
6	Diploma 2	9	6,42
7	Diploma 3	19	13,57
9	S1	39	27,85
10	S2	7	5
11	S3	0	0
Jumlah		140	100

Berdasarkan tabel diatas jika ditampilkan dalam grafik akan tampak seperti

dibawah ini:



Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden

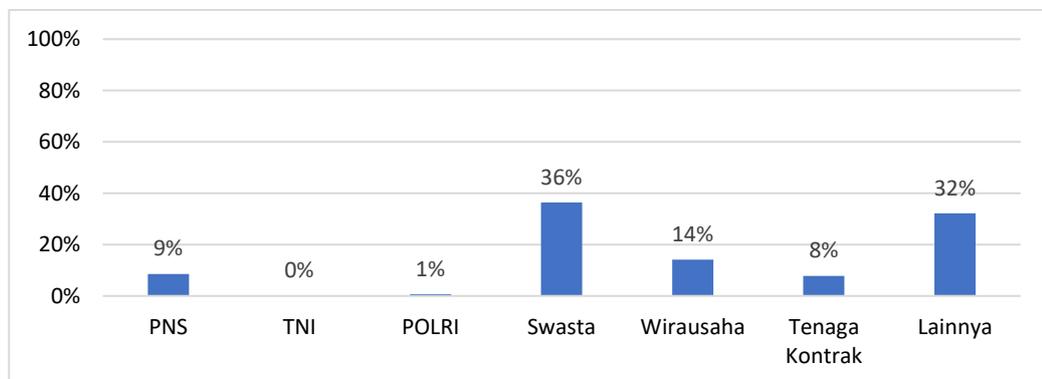
3. Pekerjaan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 140 reponden, dimana pengguna layanan yang paling banyak mengisi survei mempunyai tingkat pekerjaan swasta sebanyak 51 orang atau 36,42%.

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	PNS	12	8,57
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	0,71
4	Swasta	51	36,42
5	Wirausaha	20	14,20
6	Tenaga Kontrak	11	7,85
7	Lainnya	45	32,14
Jumlah		140	100

Tabel 3. Pekerjaan Responden

Berdasarkan tabel diatas jika ditampilkan dalam grafik akan tampak seperti dibawah ini:



Grafik 3. Pekerjaan Responden

4. Umur Responden

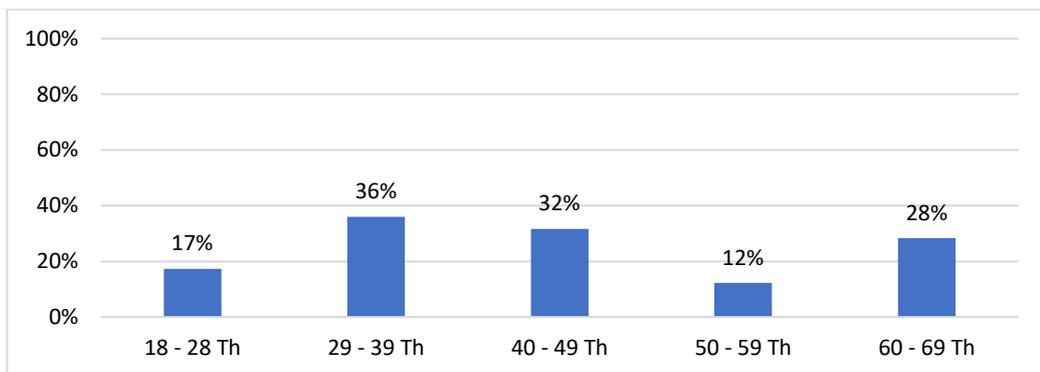
Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total

pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 140 reponden, dimana pengguna layanan yang paling banyak mengisi survei mempunyai umur 29 – 39 tahun sebanyak 50 orang atau 35,97%. Dalam tabel ditampilkan seperti berikut ini :

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	24	17,26
29 - 39 Th	50	35,97
40 - 49 Th	44	31,65
50 - 59 Th	17	12,23
60 - 69 Th	4	28,27
Total	139	

Tabel 4. Umur Responden

Berdasarkan tabel diatas jika ditampilkan dalam grafik akan tampak seperti dibawah ini:



Grafik 4. Umur Responden

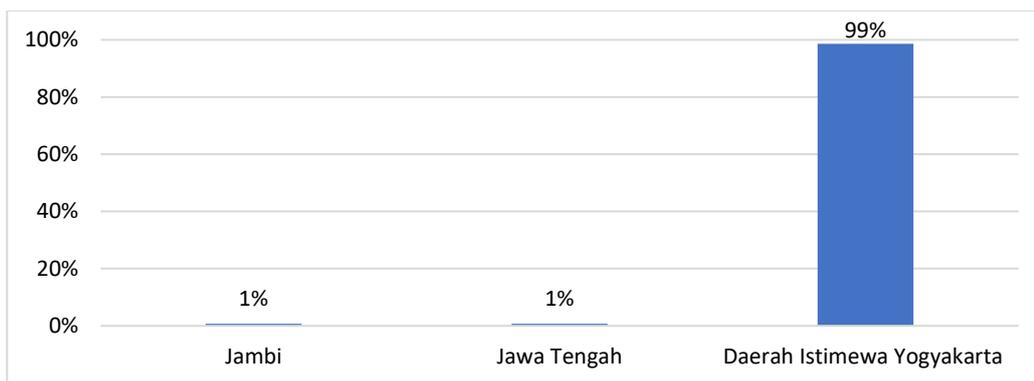
5. Domisili Responen

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 140 reponden, dimana pengguna layanan yang paling banyak mengisi survei bderdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 138 responden atau 98,57%. Dalam tabel ditampilkan seperti berikut ini :

NO	Daerah Domisili	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Jambi	1	0,71
2	Jawa Tengah	1	0,71
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	138	98,57

Tabel 5. Domisili Responden

Berdasarkan tabel diatas jika ditampilkan dalam grafik akan tampak seperti dibawah ini:



Grafik 5. Domisili Responden

B. PERSEPSI ANTI KORUPSI PER INDIKATOR

1. Diskriminasi Pelayanan

Pertanyaan dalam aplikasi SiSuper sebagai berikut “Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada layanan ini?”

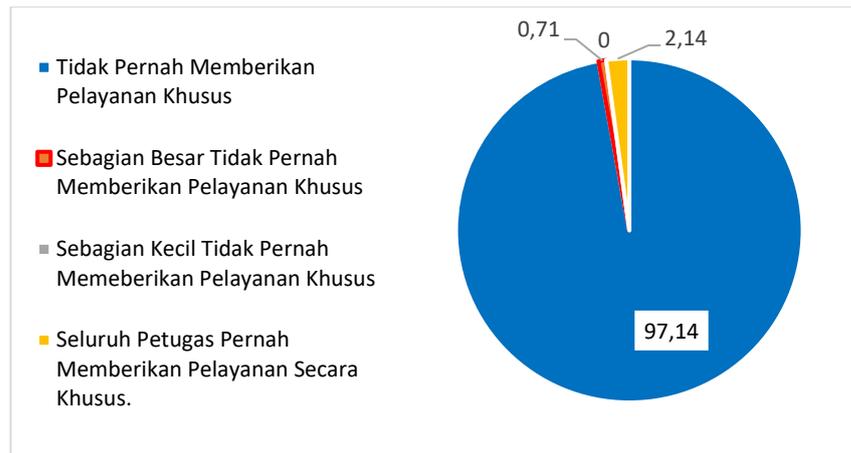
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi pelayanan menunjukkan hasil 97,14 % responden menyatakan bahwa petugas tidak pernah memberikan pelayanan khusus, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat diskriminasi pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

Hasil analisis jawaban pada ruang lingkup Diskriminasi Pelayanan disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Memberikan Pelayanan Khusus	4	136	97,14
2.	Sebagian Besar Tidak Pernah Memberikan Pelayanan Khusus	3	1	0,71
3.	Sebagian Kecil Tidak Pernah Memeberikan Pelayanan Khusus	2	0	0
4.	Seluruh Petugas Pernah Memberikan Pelayanan Secara Khusus.	1	3	2,14

Tabel 6. Diskriminasi Pelayanan

Berdasarkan tabel diatas jika ditampilkan dalam grafik akan tampak seperti dibawah ini:



Grafik 6. Diskriminasi Pelayanan

2. Pelayanan Diluar Prosedur

Pertanyaan dalam aplikasi SiSuper sebagai berikut “Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuen yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?”

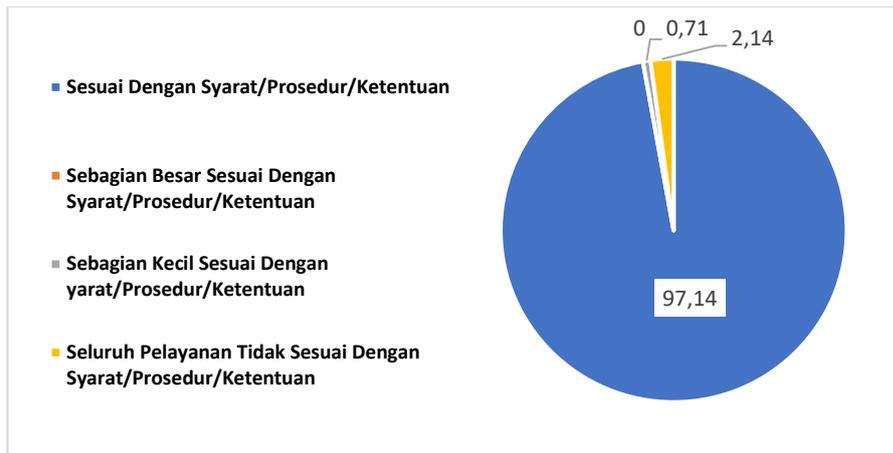
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator pelayanan diluar prosedur menunjukkan hasil 136 responden atau 97,14 % responden menyatakan bahwa petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelayanan diluar prosedur di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

Hasil analisis jawaban pada ruang lingkup pelayanan diluar prosedur disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Sesuai Dengan Syarat/Prosedur/Ketentuan	4	136	97,14
2.	Sebagian Besar Sesuai Dengan Syarat/Prosedur/Ketentuan	3	0	0
3.	Sebagian Kecil Sesuai Dengan syarat/Prosedur/Ketentuan	2	1	0,71
4.	Seluruh Pelayanan Tidak Sesuai Dengan Syarat/Prosedur/Ketentuan	1	3	2,14

Tabel 7. Pelayanan Diluar Prosedur

Berdasarkan tabel diatas jika ditampilkan dalam grafik akan tampak seperti dibawah ini:



Grafik 7. Pelayanan Diluar Prosedur

3. Penerimaan Imbalan/Suap

Pertanyaan dalam aplikasi SiSuper sebagai berikut “Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku?”

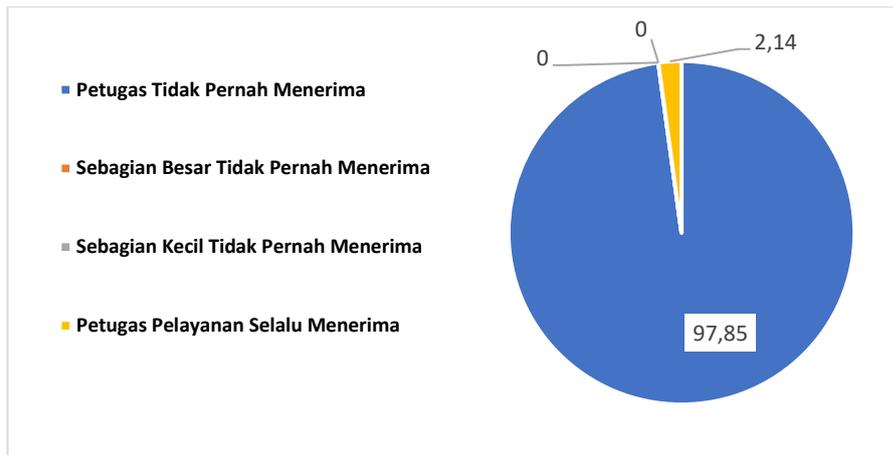
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator penerimaan suap menunjukkan hasil 137 responden atau 97,85% responden menyatakan bahwa petugas tidak pernah menerima, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penerimaan imbalan/suap di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

Hasil analisis jawaban pada ruang lingkup Penerimaan Imbalan Suap disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Petugas Tidak Pernah Menerima	4	137	97,85
2.	Sebagian Besar Tidak Pernah Menerima	3	0	0
3.	Sebagian Kecil Tidak Pernah Menerima	2	0	0
4.	Petugas Pelayanan Selalu Menerima	1	3	2,14

Tabel 8. Penerimaan Imbalan/Suap

Berdasarkan tabel diatas jika ditampilkan dalam grafik akan tampak seperti dibawah ini:



Grafik 8. Penerimaan Imbalan/Suap

4. Pungutan Liar

Pertanyaan dalam aplikasi SiSuseper sebagai berikut “Apakah ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi pada unit layanan ini ?”

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada pungutan liar menunjukkan hasil 137 responden atau 97,85% responden menyatakan bahwa petugas tidak pernah meminta dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pungutan liar di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Hasil analisis pada ruang lingkup Pungutan Liar secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Petugas Tidak Pernah Meminta	4	137	97,85
2.	Sebagian Besar Petugas Tidak Pernah Meminta	3	0	0
3.	Sebagian Besar Petugas Sering Meminta	2	0	0
4.	Sebagian Besar Petugas Selalu Meminta	1	3	2,14

Tabel 9. Pungutan Liar

Berdasarkan tabel diatas jika ditampilkan dalam grafik akan tampak seperti dibawah ini:



Grafik 9. Pungutan Liar

5. Praktik Percaloan

Pertanyaan dalam Aplikasi SiSuper sebagai berikut : “Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini?”

Hasil analisis pada ruang lingkup Praktik Percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

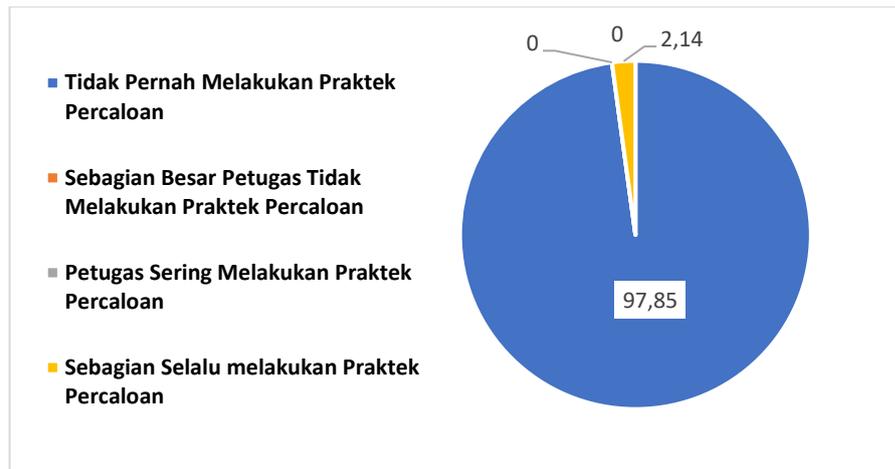
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada pratik percaloan menunjukkan hasil 137 responden atau 97,85% responden menyatakan bahwa petugas tidak pernah melakukan praktik percaloan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat praktik percaloan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Hasil analisis pada ruang lingkup percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah Melakukan Praktek Percaloan	4	137	97,85
2.	Sebagian Besar Petugas Tidak Melakukan Praktek Percaloan	3	0	0
3.	Petugas Sering Melakukan Praktek Percaloan	2	0	0
4.	Sebagian Selalu melakukan Praktek Percaloan	1	3	2,14

Tabel 10. Praktik Percaloan

Berdasarkan tabel diatas jika ditampilkan dalam grafik akan tampak seperti dibawah ini:



Grafik 10. Praktik Percaloan

6. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja

Dari 5 indikator tersebut diatas, maka diperoleh Indeks persepsi korupsi Satuan kerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebesar 3,936.

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata – Rata	Ranking
U1	Diskriminasi Pelayanan	3,929	4
U2	Pelayanan Diluar Prosedur	3,921	5
U3	Penerimaan Imbalan/Suap	3,936	1
U4	Pungutan Liar	3,936	2
U5	Praktik Percaloan	3,936	3

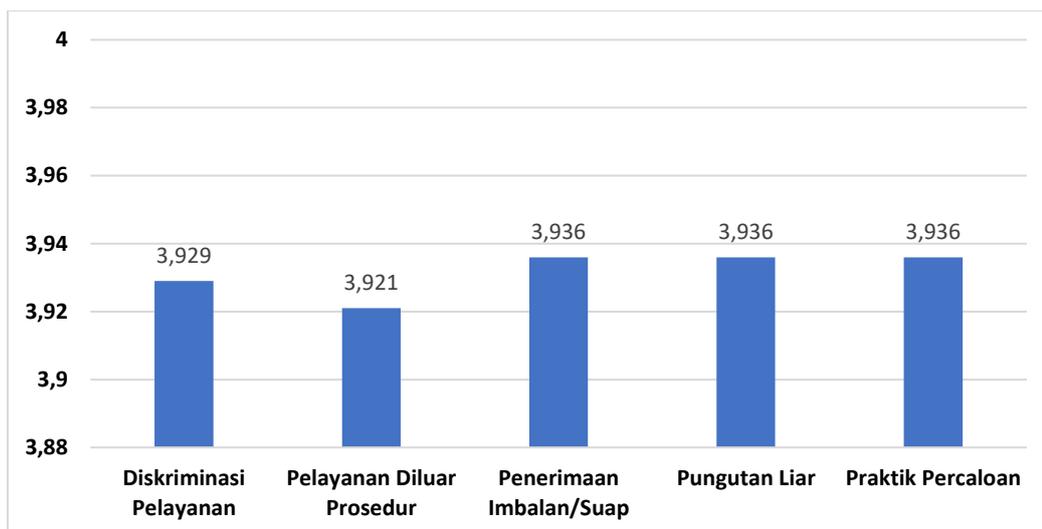
Tabel 11. Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVRSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 62,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,52 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

Tabel 12. Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

7. Persepsi Responden Terhadap Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangking masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.



Grafik 11. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks 3,936 jika dikonversi menjadi prosentase menjadi 98,29% yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**, dimana nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26- 100.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum hasil survei persepsi anti korupsi pada pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta diperoleh indeks 3,93 atau masuk dalam kategori **BERSIH DARI KORUPSI** (kisaran nilai 3,26 – 4,00).

Dengan demikian petugas pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.

2. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu **pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan, diskriminasi pelayanan, hadiah** yang dinilai cukup bersih dari korupsi tetapi kemungkinan masih cukup berpotensi adanya KKN meskipun persentasenya kecil. Dengan demikian, kedepan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua prosedur pelayanan perlu ditingkatkan

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil e-survey IPAK terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri

Yogyakarta Kelas IA, maka perlu upaya untuk diperbaiki **pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan, diskriminasi pelayanan, hadiah.**

Untuk memperbaiki indikasi **pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan** merekomendasikan :

- ✓ Masing – masing pejabat agar lebih aktif dalam mengawasi dan melakukan supervisi internal terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Untuk memperbaiki diskriminasi **pelayanan**

- ✓ Agar dalam memberikan pelayanan seluruh petugas agar melayani pengguna layanan sesuai dengan SOP yang ditetapkan

Untuk memperbaiki indikasi **hadiah**

- ✓ Mensosialisasikan ke dalam dan keluar Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk tidak memberi dan menerima pemberian dalam bentuk apapun.

LAMPIRAN
TANGKAPAN LAYAR HASIL SURVEY ZONA INTEGRITAS (ZI)
PERSEPSI ANTI KORUPSI

- I. INDEKS TOTAL, JUMLAH RESPONDEN, JENIS KELAMIN, PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN**

- II. DOMISILI RESPONDEN**

- III. UMUR RESPONDEN**

- IV. NILAI PERUNSUR**

- V. TIGA (3) UNSUR TERENDAH**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

**3 (TIGA) UNSUR TERENDAH PERSEPSI ANTI
KORUPSI TRI WULAN III TAHUN 2024**

Yogyakarta, 20 Oktober 2024

Kepada Yth.:

Ibu Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Di tempat

Sehubungan dengan telah dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Survei Indeks Persepsi Korupsi Triwulan III Tahun 2024, Tim Survei bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Tindak Lanjut Survei Indeks Persepsi Korupsi Triwulan III Tahun 2024 sebagaimana terlampir;

Demikian hal ini disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Ketua Tim Survey



Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,MH

A. LATARA BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

C. HASIL SURVEI

Secara umum hasil survei persepsi anti korupsi pada pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta diperoleh indeks 3,93 atau masuk dalam kategori BERSIH DARI KORUPSI (kisaran nilai 3,26 – 4,00).

Dengan demikian petugas pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel. Dan dari hasil survey kami tampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata – Rata	Ranking
U1	Diskriminasi Pelayanan	3,929	4
U2	Pelayanan Diluar Prosedur	3,921	5
U3	Penerimaan Imbalan/Suap	3,936	1
U4	Pungutan Liar	3,936	2
U5	Praktik Percaloan	3,936	3

Berdasarkan hasil e-survey IPAK diatas terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, maka perlu upaya untuk diperbaiki adalah **pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan, diskriminasi pelayanan dan hadiah.**

D. MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Triwulan III 2024 terhadap Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, untuk 3 (tiga) unsur terendah yaitu :

1. Pelayanan Diluar Prosedur/Ketentuan Yang Terindikasi Kecurangan

Langkah – langkah yang dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, yaitu;

1. Masing – masing pejabat/atasan langsung agar lebih aktif dalam mengawasi dan melakukan supervisi internal terhadap pelayanan yang telah diberikan.
2. Melakukan pembinaan terhadap petugas layanan khususnya petugas PTSP yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan agar memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dalam hal ini setiap pagi dilakukan apel pagi dan selalu diberi pengarahan oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekeretaris, dan Hawasbid.
3. Memasang standar pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

2. Diskriminasi Pelayanan.

1. Melakukan pembinaan terhadap petugas layanan khususnya petugas PTSP yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan agar memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dalam hal ini setiap pagi dilakukan apel pagi dan selalu diberi pengarahan oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekeretaris, dan Hawasbid.
2. Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sudah ditetapkan sistim antrian dalam pelayanan di PTSP. Dan antrian untuk sidang, serta sudah ada layanan untuk disabilitas dan pelayanan prioritas.

3. Hadiah

1. Mensosialisasikan/public campaign ke dalam dan keluar Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk tidak memberi dan menerima pemberian dalam bentuk apapun.
2. Selalu adanya pengumuman tentang larangan untuk memberi dan menerima suap yang dapat didengarkan oleh semua orang yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang diputar secara otomatis setiap 2 jam sekali.